

AKUNTABILITAS KINERJA PROGRAM  
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA  
(BSPS)  
DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN  
PERMUKIMAN PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BOALEMO

Oleh :

**Lia Susilowaty A. Hasan**  
**S.21.18. 089**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Dalam meraih Gelar Sarjana  
Pada Jurusan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S1)**  
**JURUSAN ILMU**  
**PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**2022**

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

# AKUNTABILITAS KINERJA PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOALEMO

Oleh:

**Lia Susilowaty A. Hasan**  
**S.21.18. 089**

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat.  
Pada Tanggal : .....

1. Dr. Arman S.Sos.,M.Si
2. Darmawaty Abdul Razak.S.IP.,M.AP
3. Imran Kamaruddin, S.S.,M.I.Kom
4. Balada RAF,S.Sos.,M.Si
5. Sandy Praharas,ST.,M.Si

Mengetahui,



Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Arman, M.Si  
NIDN. 0913078602



Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan  
Darmawaty Abd Razak, S.IP.,M.AP  
NIDN. 0924076701

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Lia Susilowaty A. Hasan**

**NIM : S.21.18. 089**

**Konsentrasi : Manajemen Pemerintahan Daerah**

**Program Studi : Ilmu Pemerintahan**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo”** adalah benar benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan maupn perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo 13 Juni 2022



nembuat pernyataan

Lia Susilowaty A. Hasan.

## **ABSTRACT**

**LIA SUSILOWATY A. HASAN. S2118089. ACCOUNTABILITY OF PERFORMANCE OF SELF-SUBSISTENT HOUSING STIMULANT ASSISTANCE PROGRAM AT THE OFFICE OF PEOPLE'S HOUSING, RESIDENTIAL AREA SETTLEMENT, TRANSPORTATION, AND LAND SERVICES OF BOALEMO REGENCY**

*This study aims to determine the accountability of the performance of the Self-Subsistent Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) at the Office of People's Housing, Residential Area Settlement, Transportation, and Land Services of Boalemo Regency. The type of study that the author uses is a descriptive type with a qualitative approach, where the research is descriptive. This research method employs qualitative research conducted during data collection. After data collection is completed within a certain period by interview technique, this study analyzes the responses of the interviewees. The activities in data analysis cover data reduction, data display, and drawing conclusions/verification. The results of the study indicate that the performance accountability of the Self-Subsistent Housing Stimulant Assistance Program at the Office of People's Housing, Residential Area Settlement, Transportation, and Land Services of Boalemo Regency can be said to be quite successful. It conveys several indicators approaches, namely accountability for Performance of Agencies in the Self-Subsistent Housing Stimulant Assistance Program tasks, equal opportunities for the program, performance accountability reports apparatus in the program, and work results of the program. However, there are still some weaknesses in the process and procedures for determining recipients, so it requires refinement to make them more targeted and objective.*

**Keywords:** *accountability, performance, Self-Subsistent Housing Stimulant Assistance Program*

## ABSTRAK

### **LIA SUSILOWATY A. HASAN. S2118089. AKUNTABILITAS KINERJA PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERHUBUNGAN, DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOALEMO**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian deskriptif. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dengan teknik wawancara, peneliti dengan melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancara. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data *display* dan *conclusion and drawing/verification*. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dapat dikatakan cukup berhasil dengan beberapa pendekatan indikator yaitu Pertanggung Jawaban Kinerja Instansi Dalam Tugas BSPS, Pemerataan Kesempatan Program BSPS, Laporan Akuntabilitas Kinerja Aparat dalam program BSPS, Hasil Kerja Dalam program BSPS, namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan dalam proses dan prosedur penetapan penerima sehingga perlu disempurnakan agar lebih tepat sasaran dan objektif.

Kata kunci: akuntabilitas, kinerja, program BSPS

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Motto :

“Barang siapa yang menghendaki dunia wajib atasnya dengan ilmu, barang siapa mengehendaki akhirat maka wajib atasnya dengan ilmu dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya maka wajib atasnya dengan ilmu”  
(H. R Bukhari)

Persembahan :

Karya ini kupersembahkan teruntuk :

Kedua orangtuaku yang senantiasa selalu memberikan do'a dan dukungan, kalian adalah segalanya bagiku yang selalu memberikan do'a dan nasihatnya, namun pada saat penggerjaan skripsi ini.

Suamiku yang menjadi penyemangat dikala aku lelah, yang menjadi obat dikala aku sakit, yang menjadi air dikala aku merasa dahaga. Semoga Allah senantiasa memelihara kita dalam hubungan ini aamiin.

Para sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Teman-teman serta orang-orang yang dekat dihatiku tanpa mereka semua aku takkan berarti.

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i         |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....                          | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....                             | iii       |
| PERNYATAAN.....   | iv        |
| KATA PENGANTAR.....   | v         |
| ABSTRAKS.....   | vi        |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....                                  | vii       |
| DAFTAR ISI.....   | viii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                               | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang.....                                    | 1         |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                                   | 3         |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                                 | 3         |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....                                | 3         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                         | <b>4</b>  |
| 2.1. Pengertian Akunbilitas.....                            | 5         |
| 2.1.2. Macam Akunbilitas.....                               | 5         |
| 2.1.3. Indikator Akunbilitas.....                           | 6         |
| 2.2. Pengertian Kinerja.....                                | 6         |
| 2.2.1. Sasaran Kinerja.....                                 | 7         |
| 2.3. Pengertian Akuntabilitas Kinerja.....                  | 7         |
| 2.3.1. Kebijakan Akunabilitas.....                          | 7         |
| 2.4. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)..... | 10        |
| 2.5. Kerangka Berpikir.....                                 | 14        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                       | <b>16</b> |
| 3.1. Objek Penelitian.....                                  | 16        |
| 3.2. Jenis Penelitian.....                                  | 16        |
| 3.3. Fokus Penelitian.....                                  | 16        |
| 3.4. Informan atau Narasumber.....                          | 16        |
| 3.5. Sumber Data.....                                       | 17        |
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data.....                           | 18        |
| 3.7. Teknis Analisis Data.....                              | 18        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>          | <b>20</b> |
| 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....                   | 20        |
| 4.2. Kondisi Perumahan dan Permukiman.....                  | 25        |

|   |           |
|---|-----------|
| 4.2.1. Kondisi Lingkungan Permukiman.....                   | 26        |
| 4.2.1.1. Bidang Perumahan Rakyat dan Penataan Bangunan..... | 27        |
| 4.2.1.2. Bidang Permukiman.....                             | 29        |
| 4.3. Hasil Penelitian.....                                  | 31        |
| 4.4. Pembahasan.....  | 43        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>                      | <b>47</b> |
| 5.1. Kesimpulan.....  | 47        |
| 5.2. Saran.....   | 49        |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul *“Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Boalemo.”* Skripsi ini disusun sebagai dari kewajiban mahasiswa dalam menyelesaikan studi pada program studi ilmu pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis lalaui dengan banyak macam tantangan dan hambatan namun berkat Rahmat dan Petunjuk dari Allah SWT serta dukungan dan semangat pemikiran dari segenap pihak, terutama bimbingan dari dosen dosen yang penulis rasakan selama ini atas waktu tenaga dan pikiran yang di berikan secara tulus ikhlas, dalam usaha mencapai kesempurnaan dan manfaat dari skripsi ini, Alhamdulillah semua dapat teratasi.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Bapak Muhammad Ichsan Gaffar,SE.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si. Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Arman.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo. Ibu Darmawaty Abd Razak.S.IP.,M.AP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan. Bapak Balada RAF,S.Sos.,M.S selaku Pembimbing I dan Ibu Sandy Prahara,ST.,M.Si selaku Pembimbing II dan segenap Dosen serta seluruh staf dalam lingkungan Civitas

akademika Universitas Ichsan Gorontalo. Kedua Orang Tua tercinta dan Suami serta keluarga yang selama ini selalu mendoakan dan berkorban demi keberhasilan penulis, rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan yang tidak dapat disebut namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Gorontalo, ... 2022  
Penulis

Lia Susilowaty A. Hasan  
S.21.18. 089

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan proses perubahan kemandirian masyarakat/bangsa berkelanjutan yang berpedoman pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, berorientasi pada masyarakat adil, makmur, sejahtera. Mewujudkannya pemerintah melakukan berbagai inovasi dan kreasi serta motivasi kepada masyarakat melalui program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan individu (masyarakat) dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai suatu upaya untuk mencapai kesejahteraan, pemerintah memiliki peran besar mencakup upaya untuk menggali sumber daya ekonomis seperti pajak, eksplorasi sumber daya alam, dan membuat kebijakan seperti undang-undang untuk mengatur warga negara dan mengatur barang publik, menyediakan anggaran sehingga pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik.

Kemiskinan adalah kondisi social pada saat seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu penyebab ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup adalah, sumber mata pencaharian yang tidak menentu atau bahkan tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Masalah kemiskinan ini adalah permasalahan yang harus segera ditangani. Permasalahan kemiskinan apabila dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan masalah-masalah lain. Contohnya masalah gelandangan dan pengemis dan lain-lain. Masalah kemiskinan ini harus segera diatasi untuk mencegah kondisi yang lebih parah. Dengan

mengatasi masalah kemiskinan lebih dini, diharapkan dapat mengembangkan taraf hidup masyarakat. Masyarakat dapat menikmati kehidupan yang layak, rumah yang layak ditempati serta lingkungan yang nyaman. Rumah merupakan kebutuhan yang mendasar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan usaha yang maksimal.

Dalam usaha memenuhi kebutuhan rumah dibutuhkan keterlibatan pemerintah. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemerintah menyediakan program rumah layak huni agar masyarakat dapat menikmati kenyamanan menempati rumah yang nyaman dan lingkungan yang sehat. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tercantum tentang tanggung jawab pemerintah akan penyediaan rumah serta kawasan permukiman untuk masyarakat agar dapat menempati perumahan yang layak huni. Peraturan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 13/PRT/M/2016 Tentang rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program BSPS ini untuk membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu. Kabupaten Boalemo termasuk daerah yang menjadi sasaran program dalam hal ini kementerian perumahan rakyat dan Pemerintah daerah adalah pihak yang mengetahui berapa jumlah keperluan hunian masyarakat.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai pelayanan publik berdasarkan regulasi yang ada dan diharapkan mampu dengan tepat mengenali masalah, menetapkan agenda dan arah serta strategi yang tepat. Dalam pelaksanaan program bantuan dengan berbasis keluarga ini tentunya perlunya

adanya kerjasama *stake holder* (semua pihak yang berkompeten) yang baik dengan masyarakat sebagai objek dari kegiatan untuk turut mensukseskan pelaksanaan program bantuan secara maksimal. Kemajuan kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas pelaksanaan kepemerintahan dalam memberikan pelayanan publik berkualitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian dengan judul: “*Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo*”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Boalemo?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Boalemo?

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dalam rencana penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

## **1. Secara teoritis**

Sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi kajian Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Boalemo sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan keilmuan yang akan datang.

## **2. Secara praktis**

### **a. Bagi Pemerintah**

Dari hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan dan pemerintah dalam Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Boalemo.

### **b. Bagi Akademik**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Boalemo.

### **c. Bagi Peneliti**

Dari penelitian ini peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Akuntabilitas**

Menurut Nawawi (2013: 225) Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dalam penyelesaian program dan permasalahannya.

Menurut Gharley (2000: 21) akuntabilitas yaitu berhubungan dengan seperti apa pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan, dalam hal ini berhubungan dengan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2002: 20), yaitu pertanggungjawaban pelaksana program dalam bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kepada pemberi amanat program.

Berdasarkan defenisi-defenisi diatas dapat disimpulkan akuntabilitas yaitu berhubungan dengan segala bentuk pertanggungjawaban terhadap program maupunkebijakan yang dilaksanakan dalam bentuk laporan yang bersifat terbuka, jelas dan dapat dipahami bertujuan untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggung jawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dicapai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya.

#### **2.1.2 Macam Akuntabilitas**

##### **a. Akuntabilitas Vertikal**

Pertanggung jawaban vertikal kepada atasan yang lebih tinggi. Contohnya pertanggungjawaban pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

##### **b. Akuntabilitas Horizontal.**

Akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atau lingkungan yang luas dan tidak ada hubungan antara atasan dengan bawahan. Misalnya tanggungjawab ini berkaitan erat dengan menyelesaikan tugas untuk melayani dan membantu public.

### **2.1.3. Indikator Akuntabilitas**

Menurut Dadang Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

1. Adanya kecocokan antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya output dan outcome yang terukur

Adapun menurut Teguh Kurniawan dalam Labolo (2003:17) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain :

1. Adanya akses publik pada laporan yang sudah dibuat
2. Penjelasan dan pemberian terhadap tindakan pemerintah
3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka
4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

### **2.2. Pengertian Kinerja**

Menurut Kusnadi (2003;64) kinerja merupakan hasil dari pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Menurut Hariandja (2002;195) kinerja yaitu pekerjaan yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan tupoksinya.

Menurut Moheriono (2012: 95) Kinerja adalah perolehan hasil kerja dalam melaksanakan program maupun kebijakan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Rue dan Byar dalam Nawawi (2013: 212) kinerja yaitu pencapaian kerja pegawai.

Menurut Sutoro dalam Nawawi (2013: 212-213) kinerja yaitu capaian kerja pegawai dalam suatu organisasi, sesuai tujuan organisasi.

Berdasarkan defenisi diatas kinerja adalah pencapaian yang diraih pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tupoksi yang menjadi tanggungjawabnya.

### **2.2.1. Sasaran Kinerja**

Menurut Wibowo dalam Sinambela (2012:41) Sasaran Kinerja yaitu penjabaran tentang hasil yang seharusnya dicapai. Menurut Furtwengler dalam Sinambela (2012:41) sasaran kinerja meliputi : peningkatan hasil kerja, peningkatan kemampuan pegawai, kepuasan pegawai, pemberian kompensasi.

### **2.3. Pengertian Akuntabilitas Kinerja**

Menurut Moheriono (2012:99) Akuntabilitas kinerja pada usaha swasta (perusahaan) maupun milik Negara, adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh pelaksana tugas dalam hal memberikan penjelasan mengenai hasil kinerja kepada pemberi kebijakan. Menurut Mangkunegara, (2005) Akuntabilitas kinerja penggambaran capaian pelaksanaan program kebijakan yang telah dirumuskan.

Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu program kerja.

### **2.3.1. Kebijakan Akuntabilitas**

Lembaga Administrasi Negeri RI menegaskan bahwa Pertanggung jawaban (Akuntabilitas) merupakan salah satu unsur pokok di dalam manajemen stratejik. Adapun aspek-Aspek Akuntabilitas terdiri atas;

- 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran;
- 2) Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien;
- 3) Akuntabilitas Program; Yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program;
- 4) Akuntabilitas Kebijakan; Yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan yang diambil.
- 5) Akuntabilitas Finansial;

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 juga dijelaskan bahwa;

- 1) Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.
- 2) Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau

mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program yang realistik dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

- 3) Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.
- 4) Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.
- 5) Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
- 6) Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

#### **a. Kebijakan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999**

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

**b. Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :**

- 1) menjadikan instansi pemerintah yang akuntable sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- 2) terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- 3) terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- 4) terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

**c. Ruang Lingkup :**

- 1) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi Pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah. Kegiatan yang menjadi perhatian utama mencakup :
  1. Tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah;
  2. Program kerja yang menjadi isu nasional;
  3. Aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah
- 2) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ruang lingkup tersebut di atas dilakukan oleh setiap instansi Pemerintah sebagai bahan pertanggungjawabannya kepada Presiden.

**2.4. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memiliki tujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam

lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur, untuk menjamin kepastian bermukim serta untuk meningkatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Bentuk BSPS adalah berupa uang dan barang. Untuk BSPS yang berbentuk uang digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja, sedangkan untuk BSPS yang berbentuk barang adalah berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sebagai insentif bagi kelompok penerima BSPS yang telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun instansi di daerah yang melaksanakan program BSPS adalah Satuan kerja Non Vertikal (SNVT) Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo sebagai perpanjangan tangan Direktorat Perumahan Swadaya pada Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RI.

Adapun tugas dan tanggung jawab Kepala Satuan kerja Non Vertikal Tertentu adalah;

- a. Menetapkan alokasi anggaran kegiatan BSPS untuk tiap kabupaten/kota.
- b. Menetapkan tatakelola pencairan dana BSPS
- c. Mengesahkan surat keputusan penerima bantuan
- d. Bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana BSPS kepada penerima bantuan
- e. Membuka rekening penampungan pada bank/pos penyaluran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- f. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban BSPS kepada Menteri kepada Deputi
- g. Melakukan seleksi TPM
- h. Membentuk dan menetapkan tim teknis
- i. Melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan BSPS
- j. Membuat petunjuk teknis
- k. Melakukan seleksi bank/pos penyalur penyedia barang dan pihalk ketiga lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut di atas kepala SATKER di bantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)

Adapun pejabat pembuat komitmen PPK melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal:

- a. Melakukan proses seleksi calon penerima BSPS
- b. Penentuan dan penetapan surat keputusan penerima BSPS

- c. Melakukan perikatan perjanjian dengan pihak ketiga
- d. Melakukan pembayaran
- e. Mengajukan SPP BSPS kepada pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- f. Melakukan penelitian atas laporan penyaluran dana BSPS yang disampaikan oleh bank/pos penyaluran
- g. Memastikan penyaluran dan barang BSPS kepada penerima BSPS telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran
- h. Melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran dana oleh bank/pos penyaluran, penarikan dana oleh penerima bantuan dan pelaksanaan konstruksi oleh KPB atau penerima bantuan
- i. Pengesahan DRPB2 yang dibuat oleh KPB
- j. Memfasilitasi pembuatan GK dan RPD oleh KPB Sedangkan pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas dan bertanggung jawab melakukan pengujian atas SPP dan PPK dan menerbitkan SPM-LS.

Dalam program Bantuan BSPS terdapat Tenaga Pendamping Masyarakat:

- 1) Tenaga Pendamping Masyarakat TPM dapat berbentuk perorangan dan /atau badan hukum
- 2) Tenaga Pendamping Masyarakat TPM melakukan tugas dan bertanggung jawab:
  - a. Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan peaksanaan pembangunan

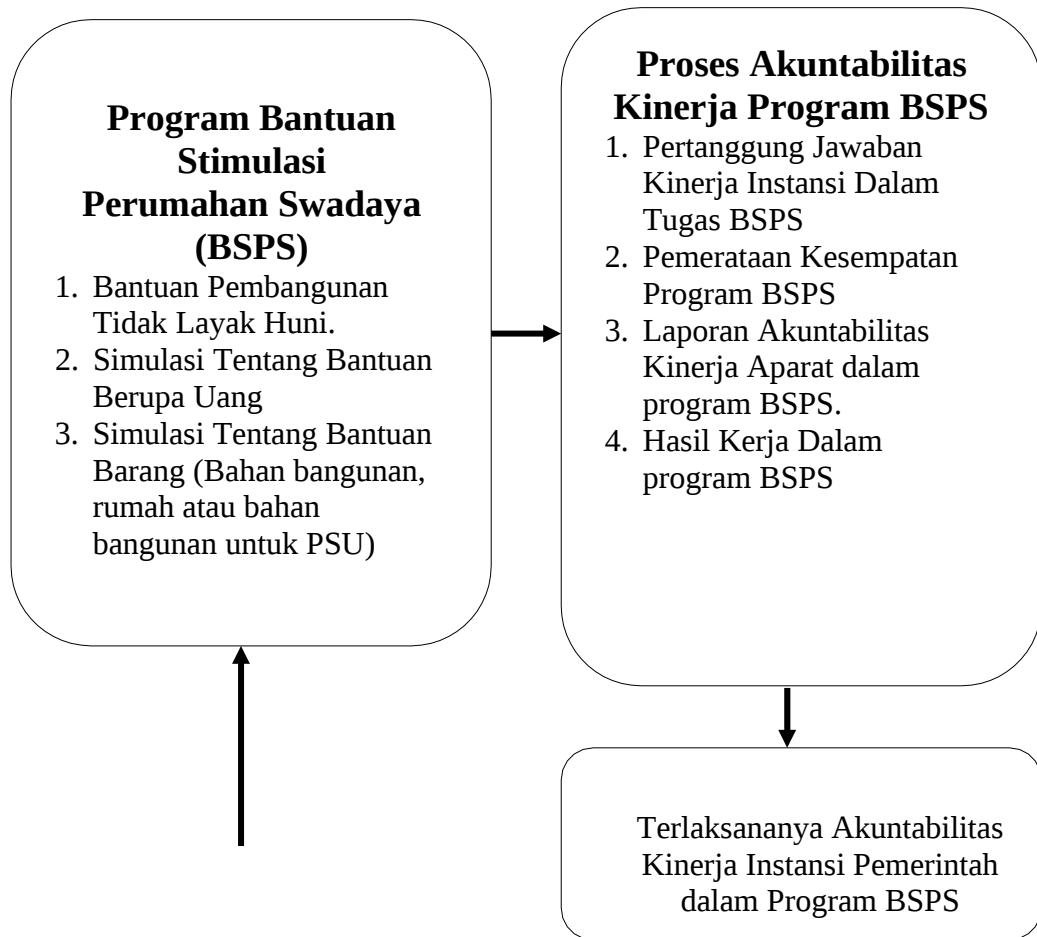
- b. Membuat laporan progres pekerjaan mulai 0% ( nol persen), 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen).
- c. Tenaga Pendamping Masyarakat TPM diangkat dan ditetapkan oleh PPK
- d. Kriteria, persyaratan dan tata cara seleksi TPM diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis deputi.

## **2.5. Kerangka Berpikir**

Berbicara tentang akuntabilitas kinerja program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Boalemo, maka sangat perlu melihat dan mencermati sampai sejauh mana capaian kinerja pemerintah selama ini. Program ini sangat bagus sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi perlu didukung oleh aparatur yang berkinerja dan berintegritas. Masyarakat harus dapat merasakan manfaatnya sekaligus dampak dari program Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Boalemo.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam kerangka pikir berikut ini :

**Gambar 1. Kerangka Pikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Boalemo. Penelitian ini direncanakan selama dua bulan.

#### **3.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang menggambarkan secara umum tentang obyek penelitian. Menurut Sugiyono (2016:11) Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.

#### **3.3. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti memfokuskan untuk meneliti Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Boalemo.

#### **3.4. Informan atau Narasumber**

Informan atau narasumber adalah orang yang memberikan informasi data dalam suatu penelitian. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposif, yaitu penentu informan dengan kriteria tertentu atau yang dapat dipercaya untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Boalemo. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah :

#### **I. BIDANG SEKRETARIS :**

1. Kepala Dinas : 1 Orang
2. Sekretaris Dinas : 1 Orang
3. Kasubag Penyusunan Program : 1 Orang

#### **II. BIDANG PERUMAHAN**

4. Kabid Perumahan Rakyat & Penataan Bangunan : 1 Orang
5. Pelaksana BSPS / TFL : 1 Orang

#### **3.5. Sumber Data**

Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini ada dua sumber data, yaitu :

1. Sumber data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan dilokasi penelitian.
2. Sumber data sekunder, yaitu semua data dan dokumentasi dari lokasi penelitian yang dianggap relevan dengan fokus penelitian.

#### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data di lapangan, khususnya data primer, dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan sebagai berikut :

- a. Wawancara mendalam

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melalui tanya jawab kepada informan untuk menggenal lebih jauh terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Observasi dan pengamatan

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Tahap awal observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan yang bersifat umum, yaitu memahami kegiatan yang terjadi dan dikaitkan dengan masalah yang diteliti.

### **3.7. Teknis Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif menurut Miles and Huberman, yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah memilah-milah data yang dikumpulkan, membuang data yang tidak dibutuhkan dan mengambil data yang berhubungan dengan penelitian. Dan apabila data yang dikumpulkan dianggap belum valid, proses ini dilakukan berulang kali sampai data yang dikumpulkan dianggap valid.

2. Penyajian data

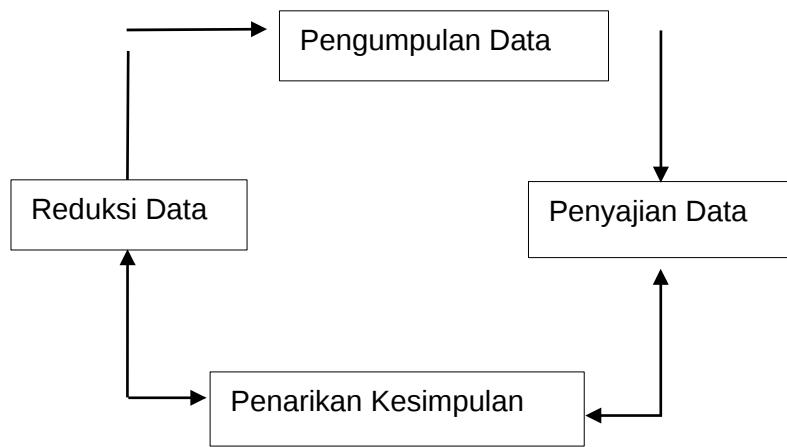
Penyajian data yaitu, data yang telah melalui proses reduksi data disajikan sebagai hasil penelitian. Selanjutnya dapat dilanjutkan untuk penarikan kesimpulan penelitian.

3. Penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dianggap valid sudah melalui konfirmasi kebenaran data.

Disajikan dalam bahasa yang singkat dan jelas. Tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan suatu proses siklus dan interaktif, dapat dilihat gambar berikut ini :

**Gambar 3.1. Model Analisis Interaktif (*Interactive model of analysis*)**



Sumber : Miles dan Huberman (2007 : 20)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Perhubungan dan Pertanahan telah memiliki Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Tahun 2017–2022 yang merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Balemo di bidang perumahan rakyat, kawasan Pemukiman, perhubungan dan pertanahan berdasarkan perundangan undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki.

Penyediaan infrastruktur di bidang perumahan, Pemukiman, pertanahan dan perhubungan menjadi kontribusi dan berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah, dimana infrastruktur ini merupakan prasarana dasar yang akan mendukung meningkatnya perekonomian masyarakat, menunjang tersedianya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah serta menyiapkan kawasan Pemukiman yang baik dan layak untuk ditempati melalui sarana dan prasarana pendukungnya.

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Balemo di bidang perumahan rakyat, kawasan Pemukiman, perhubungan dan pertanahan berdasarkan perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana uraian di atas, Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan;
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan dan pelayanan perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

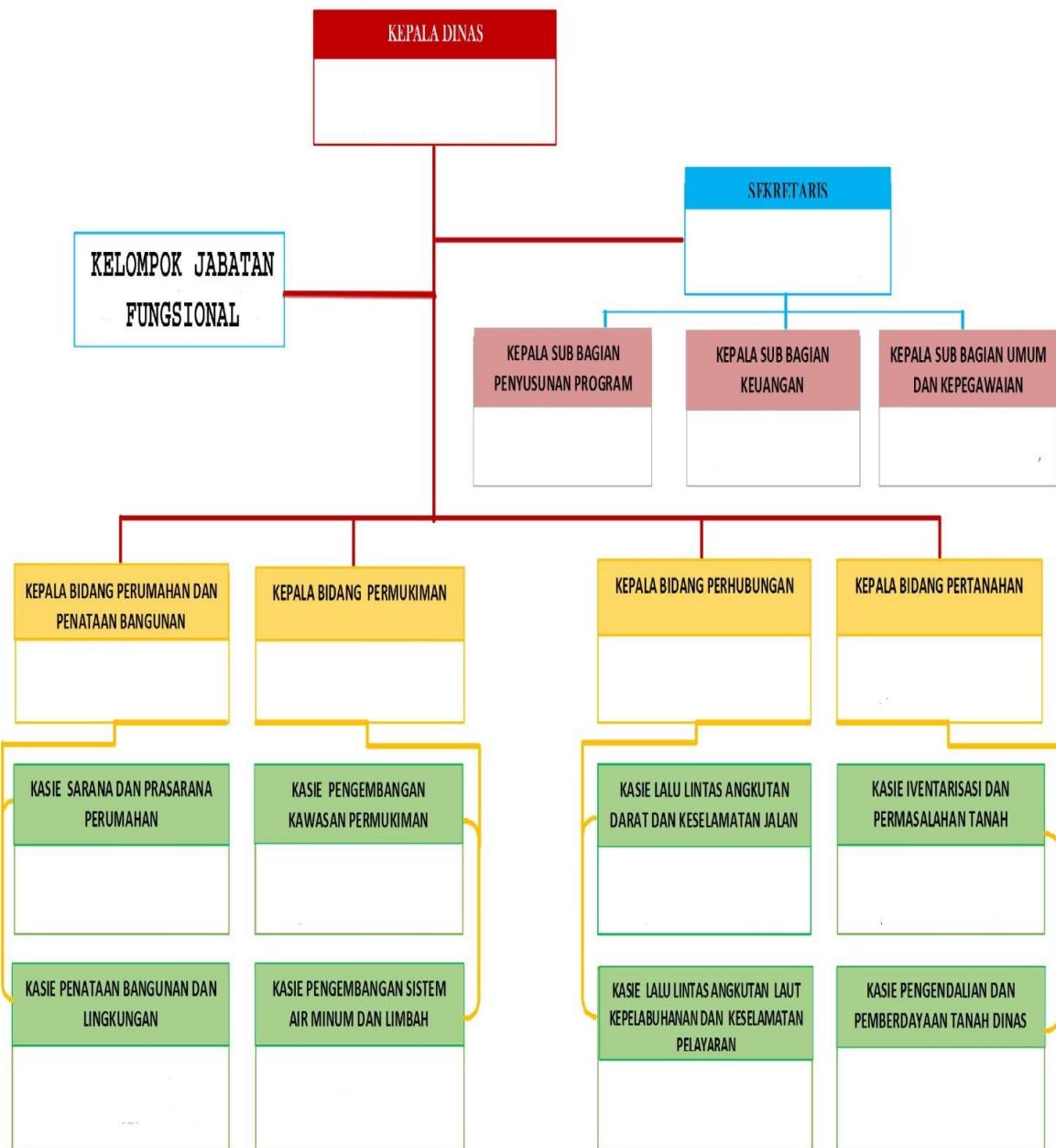
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang membawahi :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
3. Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan, yang membawahi :
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan

- b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
- 4. Bidang Permukiman, yang membawahi :
  - a. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
  - b. Seksi Pengembangan Sistem Air Minum dan Limbah
- 5. Bidang Perhubungan, yang membawahi :
  - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat dan Keselamatan Jalan
  - b. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran
- 6. Bidang Pertanahan, yang membawahi :
  - a. Seksi Inventarisasi dan Permasalahan Tanah
  - b. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Tanah

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada gambar struktur organisasi berikut ini:

**Struktur Organisasi**  
**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan**  
**Pertanahan Kabupaten Boalemo**



Dari struktur jabatan yang ada dijabarkan dalam *job description* dengan rincian sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas merupakan pejabat yang diberikan Kewenangan oleh Bupati dalam urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi merumuskan kabijakan teknis lingkup perencanaan pelayanan administrasi di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan secara terpadu agar sasaran pelaksanaan sesuai harapan.

### **3. Sekretaris Dinas**

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris Badan membawahi :

1. Sub Bagian Penyusunan Program
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Keuangan
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6. Bidang Perumahan Rakyat dan Penataan Bangunan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 37 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk sebagai implementasi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Balemo di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, perhubungan dan pertanahan berdasarkan perundangan undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki.

Berkaitan dengan hal sebagaimana di atas, maka Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo adalah merger dari beberapa dinas/instansi yaitu Bidang Cipta Karya yang berada di Dinas Pekerjaan Umum, Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.

#### **4.2. Kondisi Perumahan dan Permukiman**

Kondisi permukiman di Kabupaten Boalemo pada saat ini masih ditandai dengan rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dan menurunnya kualitas lingkungan permukiman. Sampai dengan saat ini rumah yang layak huni di Kabupaten Boalemo sebesar 76% atau 17.226 rumah dari jumlah rumah sebanyak 22.661 unit. Sedangkan kondisi rumah yang tidak layak huni sebanyak 5.435 unit atau 24%. Tingginya kebutuhan masyarakat akan

rumah yang layak dan terjangkau masih belum dapat diimbangi dengan kemampuan penyediaan perumahan baik oleh masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah.

#### 4.2.1. Kondisi Lingkungan Permukiman

Kondisi lingkungan permukiman di Kabupaten Boalemo secara umum masih bersifat permukiman yang tumbuh alami, bahkan di beberapa kawasan padat permukiman kumuh nelayan terdapat titik-titik genangan dan rawan banjir akibat sistem drainase yang masih buruk. Dalam hal pemenuhan sanitasi dasar, pada tahun 2016 cakupan sanitasi di Kabupaten Boalemo mencapai 60%. Dimana jumlah rumah tinggal yang bersanitasi sebanyak 13.668 KK dengan jumlah rumah di Kabupaten Boalemo 22.661 unit. Dalam hal pemenuhan sanitasi dasar, kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2016 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel :I. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Per Kecamatan**

Sumber : Dinas PUPR Kab. Boalemo Tahun 2017

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, menangani urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar serta empat sub urusan pemerintahan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pertanahan dan perhubungan. Oleh karena itu, dalam menyusun rencana program/kegiatan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo memperhatikan keterkaitan dengan urusan pemerintahan daerah dimaksud.

Mengacu pada gambaran data pelayanan SKPD dan kajian isu strategis yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo mempunyai beberapa Program kegiatan yang strategis untuk 5 (lima) Tahun kedepan.

Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatan strategis yang akan dilakukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut:

#### **4.2.1.1. Bidang Perumahan Rakyat dan Penataan Bangunan**

Adapun program dan kegiatan yang rencanakan pada bidang ini adalah :

1. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan strategis :
  - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - c. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - d. Pengadaan mebeuler
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  - h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - i. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
  - j. Pembangunan gedung kantor
  - k. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
  - l. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
2. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan strategis :
  - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
  - b. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan perumahan dan permukiman
  - c. Penataan ruang terbuka hijau kawasan perumahan dan permukiman
  - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial, dengan kegiatan :
  - a. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
  - b. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial

- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  - g. Penyediaan alat tulis kantor
  - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - k. Penyediaan peralatan rumah tangga
  - l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - m. Penyediaan bahan logistik kantor
  - n. Penyediaan makanan dan minuman
  - o. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah.

#### **4.2.1.2. Bidang Permukiman**

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada bidang ini selama 5 (lima) tahun adalah :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dengan kegiatan strategis :
  - a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah
  - b. Fasilitasi Pembinaan Teknis Pengolahan Air Minum
  - c. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
  - d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum
  - e. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
  - f. Fasilitasi Pembinaan Teknis Pengolahan Air Limbah
  - g. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah
  - h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan kegiatan strategis :
  - a. Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan
  - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
  - c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
  - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan strategis :
  - a. Penyediaan Jalan dan Drainase Lingkungan terutama di Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah
  - b. Pemeliharaan Infrastruktur terutama di Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah
  - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

#### **4.3. Hasil Penelitian**

Secara Umum organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Boalemo telah memiliki gedung kantor yang refresentatif dan ditunjang oleh infrastruktur fisik dan sumber daya manusia, demikian juga dengan Dinas Perumahan Pemukiman dan Perhubungan dan Kehutanan. Hasil penelitian yang telah dilakukan kurang lebih 2 bulan akan menyajikan hasil wawancara dengan nara sumber inti sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai program BSPS di daerah dan pembahasan terhadap permasalahan yang ada secara mendalam dalam beberapa tahapan.

Pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data berbagai hal yang berhubungan dengan Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Boalemo, dengan indikator sebagai berikut:

1. Pertanggung Jawaban Kinerja Instansi Dalam Tugas BSPS
2. Pemerataan Kesempatan BSPS
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Aparat dalam BSPS Kepada DIRJEN Penyediaan Perumahan.
4. Hasil Kerja Dalam Tugas BSPS

Kedua, peneliti melakukan wawancara langsung terhadap nara sumber sebagaimana proses dan hasil berikut ini:

##### **I. Pertanggung jawaban Kinerja Instansi (Dinas) Dalam Program BSPS**

Dalam hal tugas dan wewenang Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dalam Program

BSPS dapat digambarkan sebagai hasil wawancara sebagaimana tertuang dibawah ini.

“ Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan. (Kadis Disperkimhubtan: Syarifudin Kadir Lamusu, SE, MM)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan. Selanjutnya mengenai perencanaan di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dapat di gambarkan sebagai berikut ini:

“ iya memiliki, Pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Bidang Perumahan telah merencanakan Program BSPS untuk Masyarakat yang belum memiliki Rumah layak huni (Sekretaris Dinas Perkimhubtan: Rusland Djibu, ST, M.Si)”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Bidang Perumahan telah merencanakan Program BSPS untuk Masyarakat yang belum memiliki Rumah layak huni.

Selanjutnya hasil wawancara mengenai menetapkan alokasi anggaran program BSPS di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dapat digambarkan sebagai berikut:

“ Iya, Pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo telah menetapkan anggaran untuk program BSPS melalui APBN, DAK, APBD 1 dan APBD 2. (Kasubag Penyusunan Program (Erwinto Amili, S.Ap)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa Pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo telah menetapkan anggaran untuk program BSPS melalui APBN, DAK, APBD 1 dan APBD 2.

Selanjutnya mengenai bagaimanakah teknis pelaksanaan program BSPS di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo, didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“ Teknis pelaksanaan Program BSPS:

- Pengusulan lokasi BSPS oleh Bupati ke kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Cq Direktur Jenderal PUPR tembusan Gubernur. Usulan berupa data nama desa/kelurahan yang dilengkapi dengan data jumlah rumah tidak layak huni dan jumlah kebutuhan dan kekurangan rumah swadaya
- Penetapan lokasi berdasarkan hasil usulan Bupati untuk kabupaten di tetapkan oleh menteri, selanjutnya untuk penetapan lokasi desa/kelurahan ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan lokasi BSPS yang ditetapkan oleh Menteri.
- Penyiapan masyarakat dikalsanakan pada lokasi BSPS dilakukan melalui pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL),

selanjutnya TFL melakukan pendampingan pada tahap perencanaan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

- Tahap perencanaan meliputi kegiatan :
  - a. Sosialisasi atau penyuluhan
  - b. Verifikasi calon penerima BSPS
  - c. Kesepakatan calon penerima BSPS
  - d. Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal
- Penetapan calon penerima BSPS, PPK melakukan pemeriksaan proposal yang diajukan oleh calon penerima BSPS selanjutnya hasil pemeriksaan terhadap proposal calon penerima BSPS ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA/Kepala Satker sebagai penerima BSPS.
- Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS bentuk uang, penyaluran BSPS bentuk uang dilakukan oleh Bank/Pos penyalur ke rekening penerima BSP (Kabid Perumahan: Nur Umar Hiola, SE)

Selanjutnya bagaimanakah mekanisme pertanggung jawaban kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dalam program BSPS, di dapatkan hasil wawancara sebagai berikut :

- Penerima BSPS didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pemanfaatan BSPS kepada PPK
- Bank/Pos penyalur menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran BSPS kepada PPK

- TFL menyampaikan laporan kepada PPK melalui koordinator fasilitator tembusan kepada Dinas
- Koordinator fasilitator menyampaikan laporan kepada PPK tembusan kepada Dinas
- PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BSPS kepada KPA/Kepala Satker
- KPA/Kepala Satker menyampaikan laporan kegiatan BSPS kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Perumahan Swadaya (Kabid Perumahan : Nur Umar Hiola, SE)

## **II. Pemerataan Kesempatan Program BSPS**

Dalam hal Siapakah yang berhak menerima program BSPS di Kabupaten Boalemo didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

- Kecamatan : Yang punya presentasi kemiskinan yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat masih dibawah rata-rata terutama kemiskinan rumah tidak layak huni.
- Desa : Penduduk dibuktikan dengan KTP, memiliki dan menguasai tanah dibuktikan dengan alas hak yang sah, memiliki rumah yang tidak layak huni, belum pernah memperoleh bantuan BSPS, bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan dengan pernyataan tanggung renteng, yang terakhir harus masuk pada data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Kabid Perumahan Nur Umar Hiola, SE)

Selanjutnya dapat digambarkan hasil wawancara tentang kriteria yang berhak menerima program BSPS di Kabupaten Boalemo.

Jawab:

1. WNI
  2. MBR dengan penghasilan dibawah UMP rata-rata nasional
  3. Sudah berkeluarga
  4. Memiliki atau menguasai tanah
  5. Belum memiliki rumah atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni
1. Belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah
  2. Didahulukan yang memiliki rencana pembangunan / peningkatan kualitas rumah, dibuktikan dengan:
    - a. Memiliki tabungan bahan bangunan,
    - b. Telah memulai pembangunan rumah sebelum memperoleh bantuan,
    - c. Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS,
    - d. Memiliki tabungan uang yang dijadikan dana tambahan BSPS
3. Bersungguh-sungguh mengikuti Program BSPS
  4. Dapat bekerja secara berkelompok (Kabid Perumahan Nur Umar Hiola, SE)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami dengan jelas tentang kriteria yang berlaku sesuai ketentuan yang ada. Dan selanjutnya hasil wawancara tentang seleksi calon penerima program BSPS di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo.

“Ya, proposal yang dari desa calon penerima diverifikasi kemudian apakah calon penerima masuk pada kriteria penerima BSPS. Selanjutnya di seleksi sesuai tingkat kemiskinan, dari tingkat kemiskinan disaring lagi sesuai alokasi yang ada, contohnya usulan desa 50 KK, alokasi hanya 30 KK maka yang kita seleksi sesuai peringkat tingkat kemiskinan dan kerusakan rumah. (Kabid Perumahan Nur Umar Hiola, SE)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa proposal yang dari desa calon penerima diverifikasi kemudian apakah calon penerima masuk pada kriteria penerima BSPS.

Selanjutnya hasil wawancara mengenai mekanisme yang dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dalam menentukan calon penerima program BSPS.

“ mekanisme yang dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dalam menentukan calon penerima Program BSPS antara lain :

- a. Memperhatikan tingkat kemiskinan daerah kabupaten/kota
- b. Proporsi jumlah tidak layak huni terhadap jumlah rumah di daerah Kabupaten/Kota
- c. Proporsi jumlah kekurangan rumah terhadap jumlah rumah tangga di daerah Kabupaten/Kota
- d. Kepedulian pemerintah daerah Bidang Perumahan dan,
- e. Program prioritas pemerintah pusat (Kabid Perumahan Nur Umar Hiola, SE)

Selanjutnya dapat digambarkan hasil wawancara tentang pelaksanaan program BSPS oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo sudah cukup merata.

“ kalau memperhatikan dalam sistem verifikasi di tingkat kabupaten sudah sesuai, karena kita memperhatikan jumlah kebutuhan dari kecamatan dan desa, presentasi kemiskinan atau kepemilikan rumah layak huni (Kabid Perumahan Nur Umar Hiola, SE)

Demikian hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan secara terperinci.

### **III. Laporan Akuntabilita Kinaerja Aparat Dalam Program BSPS.**

Selanjutnya dapat dijelaskan hasil wawancara tentang Siapakah yang berwenang memeriksa laporan kinerja aparat dalam program BSPS.

“Jawab : Program BSPS Kabupaten Boalemo ada 2 jenis yaitu:

- Program APBN

Program APBN yang berwenang memeriksa laporan kinerja aparat dalam program BSPS adalah PPK di tingkat Satker Provinsi. Penerima BSPS didampingi Fasilitator dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pemanfaatan BSPS kepada PPK

- Program APBD

Program APBD yang berwenang memeriksa laporan kinerja aparat dalam program BSPS DAK adalah PPK ditingkat Dinas sekaligus merangkap sebagai KPA. (Kabid Perumahan Nur Umar Hiola, SE)

Selanjutnya dapat diuraikan hasil wawancara tentang model perencanaan teknis pengembangan perumahan swadaya.

“ Model perencanaan teknis pengembangan perumahan swadaya pihak Dinas melakukan permintaan proposal yang sasarannya calon lokasi di kecamatan ataupun desa sasaran calon penerima program perumahan swadaya, proposal yang diminta harus dilengkapi dengan data yang sesuai dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan dilengkapi dengan kondisi rumah. (Kasubag Penyusunan Program Erwinto Amili, S.Ap)

Selanjutnya hasil wawancara tentang model pembinaan pendataan rumah swadaya.

“ Model pembinaan pendataan rumah swadaya : Proposal yang di usulkan oleh pemerintah desa dan kecamatan. Pihak Dinas melakukan pembinaan dan pendataan serta sosialisasi kriteria calon penerima sekaligus tata cara pelaksanaan prpgram BSPS yang didampingi oleh fasilitator. Selesai sosialisasi didesa calon penerima program BSPS dilanjutkan dengan survei jumlah masyarakat miskin dan memverifikasi calon penerima berdasarkan kuota per desa dan yang memenuhi kriteria. (Kabid Perumahan Nur Umar Hiola, SE)

Selanjutnya hasil wawancara mengenai model pemantauan dan evaluasi pengembangan rumah swadaya.

“ pemantauan dan evaluasi pengembangna rumah swadaya, Dinas melakukan pemantauan serta evaluasi program BSPS tentang bagaimana pelaksanaan sosialisasi, verifikasi, penetapan calon penerima,

pembentukan kelompok serta penetapan ketua kelompok, pelaksanaan pekerjaan pembangunan program BSPS. (Kasubag Penyusunan Program Erwinto Amili, S.Ap)

Selanjutnya hasil wawancara mengenai hasil laporan akuntabilitas kinerja aparat dalam program BSPS.

“ hasil laporan akuntabilitas kinerja aparat dan program BSPS, secara umum hasil laporan baik, namun terdapat beberapa kendala, antara lain :

- Tata cara penetapan calon penerima oleh pemerintah desa sering tidak sesuai ketentuan, kadang pilih kasih
- Ketidak mampuan calon penerima untuk berswadaya
- Keterlambatan pekerjaan disebabkan oleh kurangnya tukang
- Kurangnya toko penyedia bahan bangunan dilokasi program BSPS

Adapun solusi dari kendala diatas :

- Untuk menghindari pilih kasih maka penentuan calon penerima harus diawasi dan didampingi oleh fasilitator dan pihak Dinas
- Disarankan kepada calon penerima untuk menyediakan swadaya dalam bentuk tenaga maupun bahan yang mudah disediakan
- Mencari tukang di luar desa penerima program
- Mencari toko penyedia diluar desa penerima program (Kasubag Penyusunan Program Erwinto Amili, S.Ap)

#### **IV. Hasil Kerja Dalam Program BSPS**

Dalam bagian ini akan dituangkan hasil wawancara mengenai capaian program BSPS sesuai perencanaan baik anggaran ataupun kegiatan.

“capaian program BSPS berdasarkan anggaran dan kegiatan belum mencapai target yang diharapkan. Contohnya : Data KK miskin yang harus mendapatkan program BSPS dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebanyak 1.446 KK, Tahun 2019 sebanyak 480 KK, Tahun 2020 925 KK, dan Tahun sebanyak 2021 41 KK dan usulan Data Rumah Tidak Layak Huni. Dari hasil diatas masih ada sekian ribu yang belum tersentuh program ini disebabkan oleh minimnya anggaran yang diturunkan ke Dinas tiap tahunnya. (Kasubag Penyusunan Program Erwinto Amili, S.Ap)

Selanjutnya hasil wawancara mengenai jumlah calon penerima sesuai dengan perencanaan.

- a. Jumlah (unit) rumah swadaya yang dibangun baru?
- b. Jumlah (unit) rumah swadaya yang ditingkatkan kualitasnya ?

“Tidak sesuai, contohnya pada tahun 2019 direncanakan 500 KK yang terealisasi hanya sebanyak 480 KK tahun 2020 1000 KK yang terealisasi hanya 925 KK Tahun 2021 100 KK yang terealisasi 41 KK

- a. Jumlah rumah swadaya yang dibangun baru tidak ada
- b. Jumlah rumah swadaya yang ditingkatkan kualitas 3 tahun terakhir 1.446 unit (Kasubag Penyusunan Program Erwinto Amili, S.Ap)

Selanjutnya hasil wawancara mengenai model pembinaan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam penyediaan rumah swadaya.

“ Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diberikan pembinaan oleh petuga, Dinas atau Fasilitator agar mengembangkan diri mereka maka harus mampu berkreasi atau berinovasi untuk menciptakan lapangan kerja (Kabid Perumahan Nur Umar Hiola, SE)

Selanjutnya hasil wawancara mengenai model pembinaan pelaksanaan pengembangan perumahan swadaya.

“ model pembinaan pelaksanaak pengembangan perumahan swadaya, dalam pelaksanaan program BSPS diatur dalam ketentuan bahwa setiap penerima bantuan diharapakna untuk dapat memberikan swadaya dalam bentuk apa saja, misalkan swadaya tenaga, swadaya uang dan swadaya bahan bangunan.(Kabid Perumahan Nur Umar Hiola, SE)

Selanjutnya hasil wawancara mengenai evaluasi program BSPS di Kabupaten Boalemo.

“ evaluasi program BSPS di Kabupaten Boalemo, pelaksanaan evaluasi program BSPS di Kabupaten Boalemo kita melihat hasil akhir berdasarkan kebutuhan masyarakat miskin terhadap keterpenuhan rumah layak huni. (Kadis Disperkimhubtan : Syarifudin Kadir Lamusu, SE, MM)

Demikian proses wawancara yang menghasil berbagai jawaban sebagaimana tertera diatas. Selanjutnya peneliti akan membahas dalam bagian berikutnya.

#### **4.4. Pembahasan**

Secara sederhana, akuntabilitas pemerintah dapat dianggap sebagai suatu proses atau mekanisme yang di dalamnya pegawai atau organisasi pemerintah dapat diberikan sanksi apabila perilaku dan atau kinerja mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan (Bulgan:2000).

Pertangungjawaban program BSPS dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik yang ditandai dengan adanya perencanaan program untuk Masyarakat (Sek Dinas Perkimhubtan: Ruslan Djibu, ST, M.Si), menetapkan alokasi anggaran program BSPS melalui APBN, DAK, APBD 1 dan APBD 2. (Kasubag Penyusunan Program (Erwinto Amili, S.Ap) dengan teknis pelaksanaan yaitu pengusulan lokasi. Penetapan berdasarkan hasil usulan. Penyiapan masyarakat di lokasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Penetapan calon penerima oleh PPK dan disahkan oleh KPA/Kepala Satker sebagai penerima BSPS. Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan dilakukan oleh Bank/Pos penyalur ke rekening penerima (Kabid Perumahan: Nur Umar Hiola, SE) dan mekanisme pertanggung jawaban kinerja Penerima didampingi TFL kepada PPK melalui koordinator fasilitator. PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada KPA/Kepala Satker. KPA/Kepala Satker menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Perumahan Swadaya (Kabid Perumahan : Nur Umar Hiola, SE).

Pemerataan Kesempatan Program BSPS telah dilaksanakan dengan baik yang ditandai kegiatan yang dilakukan secara berjenjang seperti pada tingkat kecamatan dan pada tingkat desa sebagaimana ketentuan melalui prosedur dan

mekanisme yang berlaku, dengan pelaksanaan program sudah cukup merata dengan memperhatikan sistem verifikasi di tingkat kabupaten sudah sesuai, karena kita memperhatikan jumlah kebutuhan dari kecamatan dan desa, presentasi kemiskinan atau kepemilikan rumah layak huni (Kabid Perumahan Nur Umar Hiola, SE.)

Laporan Akuntabilitas Kinaerja Aparat Dalam Program BSPS telah dilaksanakan sebagai pedoman ketentuan yang berlaku dalam program yaitu program BSPS Kabupaten Boalemo ada 2 jenis yaitu Program APBN dan Program APBD dengan memperhatikan ketentuan yang ada (Kabid Perumahan Nur Umar Hiola, SE) dengan model perencanaan teknis pengembangan perumahan swadaya melakukan permintaan proposal dengan data yang sesuai dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan dilengkapi dengan kondisi rumah (Kasubag Penyusunan Program Erwinto Amili, S.Ap), dan proses pembinaan telah berjalan dengan baik dengan dilakukannya pembinaan oleh pihak Dinas serta sosialisasi kriteria calon penerima sekaligus tata cara pelaksanaan program didampingi oleh fasilitator dilanjutkan dengan survei jumlah masyarakat miskin dan memverifikasi calon penerima berdasarkan kuota per desa dan yang memenuhi kriteria. (Kabid Perumahan Nur Umar Hiola, SE). Pemantauan dan evaluasi pengembangan rumah swadaya juga telah dilaksanakan sebagaimana prosedur, yaitu Dinas melakukan pemantauan serta evaluasi program bagaimana pelaksanaan sosialisasi, verifikasi, penetapan calon penerima, pembentukan kelompok serta penetapan ketua kelompok, pelaksanaan pekerjaan pembangunan program BSPS (Kasubag Penyusunan Program Erwinto Amili, S.Ap).

Hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja aparat dalam program BSPS secara umum hasil laporan baik, namun terdapat beberapa kendala, antara lain :

- Tata cara penetapan calon penerima oleh pemerintah desa sering tidak sesuai ketentuan, kadang pilih kasih
- Ketidak mampuan calon penerima untuk berswadaya
- Keterlambatan pekerjaan disebabkan oleh kurangnya tukang
- Kurangnya toko penyedia bahan bangunan dilokasi program

BSPS Adapun solusi dari kendala diatas :

- Untuk menghindari pilih kasih maka penentuan calon penerima harus diawasi dan didampingi oleh fasilitator dan pihak Dinas
- Disarankan kepada calon penerima untuk menyediakan swadaya dalam bentuk tenaga maupun bahan yang mudah di sediakan
- Mencari tukang di luar desa penerima program
- Mencari toko penyedia diluar desa penerima program (Kasubag Penyusunan Program Erwinto Amili, S.Ap)

Dalam hal Hasil Kerja Dalam Program BSPS capaian program BSPS sesuai perencanaan baik anggaran ataupun kegiatan, berdasarkan anggaran dan kegiatan belum mencapai target yang diharapkan. disebabkan oleh minimnya anggaran yang diturunkan ke Dinas tiap tahunnya. (Kasubag Penyusunan Program Erwinto Amili, S.Ap). perihal jumlah calon penerima sesuai dengan perencanaan, tidak sesua kerena yang terealisasi hanya sebanyak 480 KK tahun 2020 1000 KK yang terealisasi hanya 925 KK Tahun 2021 100 KK yang terealisasi 41 KK. (Kasubag Penyusunan Program Erwinto Amili, S.Ap). Dan bagaimanakah model

pembinaan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam penyediaan rumah swadaya, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diberikan pembinaan oleh petugas, Dinas atau Fasilitator agar mengembangkan diri mereka maka harus mampu berkreasi atau berinovasi untuk menciptakan lapangan kerja (Kabid Perumahan Nur Umar Hiola, SE). Dan Bagaimanakah model pembinaan pelaksanaan pengembangan perumahan swadaya telah diatur dalam ketentuan bahwa setiap penerima bantuan diharapkan untuk dapat memberikan swadaya dalam bentuk apa saja, misalkan swadaya tenaga, swadaya uang dan swadaya bahan bangunan (Kabid Perumahan Nur Umar Hiola, SE). dan **bagaimanakah** evaluasi program BSPS pelaksanaan evaluasi program BSPS di Kabupaten Boalemo kita melihat hasil akhir berdasarkan kebutuhan masyarakat miskin terhadap keterpenuhan rumah layak huni. (Kadis Disperkimhubtan : Syarifudin Kadir Lamusu, SE, MM)

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Pertangungjawaban program BSPS berjalan dengan baik dengan ditandai adanya adanya perencanaan program, penetapan alokasi anggaran melalui APBN, DAK, APBD 1 dan APBD 2. Teknis pelaksanaan, penetapan, penyiapan masyarakat di lokasi, penetapan calon penerima yang disahkan oleh KPA/Kepala Satker. Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan dan mekanisme pertanggung jawaban kinerja penerima, penyampaian laporan pelaksanaan.

Pemerataan Kesempatan Program BSPS telah dilaksanakan dengan baik yang ditandai adanya kegiatan yang dilakukan secara berjenjang, pelaksanaan program sudah cukup merata dengan memperhatikan sistem verifikasi dengan jumlah kebutuhan dari kecamatan dan desa, presentasi kemiskinan atau kepemilikan rumah layak huni.

Laporan Akuntabilitas Kinaerja Aparat Dalam Program BSPS telah dilaksanakan sebagaimana pedoman yang berlaku seperti adanya model perencanaan teknis, adanya proses pembinaan dengan survei dan memverifikasi, pemantauan dan evaluasi. Hasil laporan akuntabilitas kinerja aparat dalam program BSPS secara umum hasil laporan baik, namun terdapat beberapa kendala, antara lain tata cara penetapan calon penerima oleh pemerintah desa sering tidak

sesuai ketentuan, kadang pilih kasih, ketidak mampuan calon penerima untuk berswadaya, keterlambatan pekerjaan disebabkan oleh kurangnya tukang, Kurangnya toko penyedia bahan bangunan dilokasi program BSPS.

Hasil kerja dalam program BSPS dimana capaian belum sesuai perencanaan baik anggaran ataupun kegiatan disebabkan oleh minimnya anggaran. Jumlah calon penerima tidak sesuai kerena yang terealisasi hanya sebanyak 480 KK tahun 2020 1000 KK yang terealisasi hanya 925 KK Tahun 2021 100 KK yang terealisasi 41 KK. Terdapat Model pembinaan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam penyediaan rumah swadaya.

## 5.2. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

Disarankan agar dalam hal pertanggungjawaban program BSPS untuk lebih ditingkatkan dengan cara sinkronisasi perencanaan program dan alokasi anggaran baik melalui APBN, DAK, APBD 1 dan APBD 2. Dan teknis pelaksanaan, penetapan, penyiapan masyarakat di lokasi, penetapan calon penerima agar lebih selektif dan akurat baik dalam pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan dan mekanisme pertanggung jawaban kinerja penerima, penyampaikan laporan pelaksanaan.

Disarankan agar proses dan prosedur pemerataan kesempatan program BSPS lebih ditingkatkan dengan cara identifikasi dan verifikasi yang teliti dalam setiap jenjang dengan memperhatikan sistem verifikasi jumlah kebutuhan dari kecamatan dan desa, presentasi kemiskinan atau kepemilikan rumah layak huni.

Disarankan adanya penyempurnaan pedoman laporan akuntabilitas kinerja aparat dalam program BSPS secara berkala baik dalam model perencanaan teknis, proses pembinaan survei dan verifikasi serta pemantauan secara akurat (valid), hasil laporan akuntabilitas kinerja aparat program BSPS dapat mengurangi kendala dilapangan dengan pengawasan dan pendampingan oleh fasilitator dan pihak Dinas. Sehingga calon penerima faham dan termotivasi untuk mau berswadaya.

Disarankan adanya peningkatan anggaran, mengingat capaian program BSPS belum sesuai perencanaan baik anggaran ataupun kegiatan disebabkan oleh minimnya anggaran sehingga yang berdampak pada jumlah penerima dan

penyempurnaan model pembinaan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam penyediaan rumah swadaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang:Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Amir Imbaruddin. (2018) “ Birokrasi Akuntabilitas Kinerja” Deepublish CV. Budi Utama. Yogyakarta
- C. Djemabut Blaang, (1986). “Perumahan dan Pemukiman”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2004) Kebijakan Publik:Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Moleong, L. J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya Bandung, 6.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol.2, No.1.
- Mahmudi. 2013. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Raba, Manggaukang. 2006. Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Sedarmayanti. 2003. Good Govenance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.
- LAN & BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 07/SE/Dr/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Direktorat Rumah Swadaya

### **Sumber lainnya (Internet/Jurnal)**

Ferawati, Said Mohammad, Maryono Alqaf Harto. (2015). Peran Tenaga Pendamping Masyarakat Terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Sumenep. Vol 7, No 1. Supardi. (2016).

Pengawasan Pelaksanaan Program Bedah Rumah Masyarakat Miskin Di Desa Selegi Besar Tahun 2012. Vol 5, No 2 Beby S D Banteng (2015) Menuju Kota Layak Huni dan Berkelaanjutan Studi Kasus Kota Gorontalo.

Syntia Bela. 2017. “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.” 14(1): 55–64.

Zulkarnain. 2016. “Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Parigi.” Katalogis 4(10): 52–63

## DOKUMENTASI

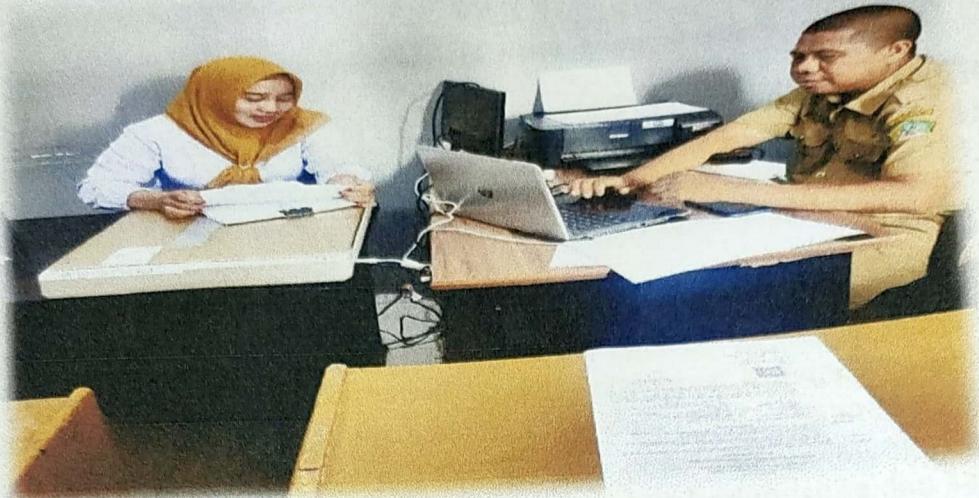


Proses Wawancara bersama Kepala Dinas PERKIMHUBTAN Kabupaten Boalemo  
Bapak Syarifudin M Lamusu, SE,MM



Proses Wawancara bersama Sekretaris Dinas PERKIMHUBTAN Kabupaten Boalemo  
Bapak Rusland D , ST. M.Si





Proses Wawancara bersama Kasubag Program Dinas PERKIMHUBTAN Kabupaten Boalemo Bapak Irwanto Amili, S.Ap



Proses Wawancara bersama Kabid Perumahan Kabupaten Boalemo Ibu Nur Umar Hiola, SE

## ABSTRAK

### **LIA SUSILOWATY A. HASAN. S2118089. AKUNTABILITAS KINERJA PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERHUBUNGAN, DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOALEMO**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian deskriptif. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dengan teknik wawancara, peneliti dengan melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancara. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data *display* dan *conclusion and drawing/verification*. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dapat dikatakan cukup berhasil dengan beberapa pendekatan indikator yaitu Pertanggung Jawaban Kinerja Instansi Dalam Tugas BSPS, Pemerataan Kesempatan Program BSPS, Laporan Akuntabilitas Kinerja Aparat dalam program BSPS, Hasil Kerja Dalam program BSPS, namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan dalam proses dan prosedur penetapan penerima sehingga perlu disempurnakan agar lebih tepat sasaran dan objektif.

Kata kunci: akuntabilitas, kinerja, program BSPS



## ABSTRACT

**LIA SUSILOWATY A. HASAN. S2118089. ACCOUNTABILITY OF PERFORMANCE OF SELF-SUBSISTENT HOUSING STIMULANT ASSISTANCE PROGRAM AT THE OFFICE OF PEOPLE'S HOUSING, RESIDENTIAL AREA SETTLEMENT, TRANSPORTATION, AND LAND SERVICES OF BOALEMO REGENCY**

*This study aims to determine the accountability of the performance of the Self-Subsistent Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) at the Office of People's Housing, Residential Area Settlement, Transportation, and Land Services of Boalemo Regency. The type of study that the author uses is a descriptive type with a qualitative approach, where the research is descriptive. This research method employs qualitative research conducted during data collection. After data collection is completed within a certain period by interview technique, this study analyzes the responses of the interviewees. The activities in data analysis cover data reduction, data display, and drawing conclusions/verification. The results of the study indicate that the performance accountability of the Self-Subsistent Housing Stimulant Assistance Program at the Office of People's Housing, Residential Area Settlement, Transportation, and Land Services of Boalemo Regency can be said to be quite successful. It conveys several indicators approaches, namely accountability for Performance of Agencies in the Self-Subsistent Housing Stimulant Assistance Program tasks, equal opportunities for the program, performance accountability reports apparatus in the program, and work results of the program. However, there are still some weaknesses in the process and procedures for determining recipients, so it requires refinement to make them more targeted and objective.*

**Keywords:** accountability, performance, Self-Subsistent Housing Stimulant Assistance Progr



## PAPER NAME

SKRIPSI\_S2118089\_LIA SUSILOWATY A  
HASSAN\_AKUNTABILITAS KINERJA PRO  
GRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAH  
AN SW

## AUTHOR

S2118089 LIA SUSILOWATY A HASSAN

## WORD COUNT

7861 Words

## CHARACTER COUNT

52523 Characters

## PAGE COUNT

51 Pages

## FILE SIZE

744.2KB

## SUBMISSION DATE

Jun 17, 2022 4:40 AM GMT+8

## REPORT DATE

Jun 17, 2022 4:43 AM GMT+8

**● 24% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

**● Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

**● 24% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 24% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

**TOP SOURCES**

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

|   |                                |     |
|---|--------------------------------|-----|
| 1 | repository.umsu.ac.id          | 12% |
|   | Internet                       |     |
| 2 | portal.boalemokab.go.id        | 4%  |
|   | Internet                       |     |
| 3 | harimawan.files.wordpress.com  | 2%  |
|   | Internet                       |     |
| 4 | therealonline.blogspot.com     | 1%  |
|   | Internet                       |     |
| 5 | dprd.boalemokab.go.id          | 1%  |
|   | Internet                       |     |
| 6 | scribd.com                     | 1%  |
|   | Internet                       |     |
| 7 | kaltara.bpk.go.id              | <1% |
|   | Internet                       |     |
| 8 | journal.stisipolrajahaji.ac.id | <1% |
|   | Internet                       |     |

|    |                 |     |
|----|-----------------|-----|
| 9  | harmony.co.id   | <1% |
|    | Internet        |     |
| 10 | vdocuments.site | <1% |
|    | Internet        |     |



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001  
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp ( 0435 ) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

Nomor : 132/FISIP-UNISAN/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP  
NIDN : 0924076701  
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : LIA SUSILOWATY A. HASSAN  
NIM : S2118089  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsp) Di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan Dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 24%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

**LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 – Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp. (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 361/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala KESBANGPOL Kabupaten Boalemo  
di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Lia Susilowaty A Hasan

NIM : S2118098

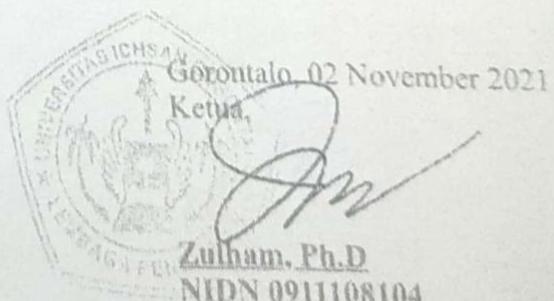
Fakultas : Fakultas Ilmu Pemerintahan Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Dinas PerumahanRakyat Kawasan Permukiman Perhubungan Dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

Judul Penelitian : Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)  
Dinas PerumahanRakyat Kawasan Permukiman Perhubungan Dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO  
KANTOR KESBANG POL & LINMAS

Alamat : JL. Sultan Hulusi Desa Modelomo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/KesbangPol/130/XII/2021

Kepala Kantor Kesbang Pol & Linmas Kabupaten Boalemo, setelah membaca Surat dari Kelu LEMLIT Universitas Ichsan Gorontalo. Nomor : 3619/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2021 Tanggal 02 November 2021 Perihal Permohonan Penelitian maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

**Nama** : Lia Susilowaty A. Hasan  
**NIM** : S2118098  
**Fak/Prodi** : Fakultas Ilmu Sosial politik/ ilmu Pemerintahan  
**Alamat** : Desa Bangga Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo  
**Judul Penelitian** : "Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Didinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan Dan Pertahanan Kabupaten Boalemo"  
**Lokasi Penelitian** : Dinas Perkimhubtan Kab.Boalemo  
**Waktu** : 3 (Tiga) Bulan terhitung sejak tanggal 15 November s.d 15 Februari 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama mengadakan Penelitian agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta melapor kepada Pemerintah setempat yang menjadi obyek penelitian.
2. Tidak dibenarkan menggunakan rekomendasi ini untuk kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan Penelitian.
3. Setelah melakukan Penelitian agar menyampaikan 1 eksemplar laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kab. Boalemo Cq. Kepala Kantor Kesbang Pol Kab. Boalemo
4. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali atau dinyatakan tidak berlaku apabila peneliti tidak memtaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Tilamuta, 18 November 2021  
A.n KEPALA KANTOR KESBANG POL  
KABUPATEN BOALEMO  
KASIE POLITIK & HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

SRI HASTUTY AMIR, SE  
NIP. 19781229 200701 2 008

Tembusan:

1. Yth. Pit Bupati Boalemo (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Lemlit UNISAN
3. Yth. Kadis Perkimhubtan Kabupaten Boalemo
4. Yang bersangkutan

Arsip



**SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
**Nomor 300/003/ Disperkimhubtan/v/2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAFRUDIN KADIR LAMUSU SE MM  
Nip : 197110232000121003  
Jabatan : Kepala Dinas  
Instansi : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Perhubungan dan Pertanahan

Dengan ini menerangkan Bahwa:

Nama : Lia Susilowaty A Hasan  
Nim : S2118098  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu sosial dan Ilmu Politik  
Perguruan Tinggi : Universitas Iehsan Gorontalo

Benar-benar mengadakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “  
Akuntabilitas kinerja program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Di dinas  
perumahan rakyat kawasan pemukiman perhubungan dan pertanahan kabupaten  
boalemo”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tilamuta, 2022

  
SYAFRUDIN KADIR LAMUSU SE, MM  
Nip. 197110232000121003

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS ILMU PEMERITAHAN**

---

**RIWAYAT HIDUP**



**I. DATA PRIBADI**

- Nama Lengkap : Lia Susilowaty A Hasan
- NIM : S2118098
- Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
- Jurusan : Ilmu Pemerintahan
- Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 18 Maret 1989
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Status Perkawinan : Kawin
- Alamat : Desa Limbato Kec. Tilamuta Kab. Boalemo
- Pekerjaan : Tenaga Honorer

**II. Riwayat Pendidikan**

- SD : 1997-2003
- SMP : 2003-2005
- SMA : 2005-2007
- UNIVERSITAS : 2018-2022